

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. KAJIAN PUSTAKA

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya atau kekuatan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Menurut Edi Suharto (2010, 57-58) bahwa konsep pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Oleh karena itu, gagasan pertama tentang pemberdayaan sangat bertautan dengan konsep perihal kekuasaan, kekuasaan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mewujudkan orang lain melakukan apa yang dilakukan, terlepas dari harapan dan minat masyarakat. Ilmu khusus tradisional mengutamakan bahwa kekuasaan sangat bertautan sekali dengan pengaruh dan kontrol. Kekuasaan dan relasi kekuasaan juga bisa berubah, sehingga kekuasaan tidak vakum serta tersiolisasi, kekuasaan juga hadir dalam konteks relasi sosial.

Pemberdayaan disesuaikan dari istilah *Empowerment* yang dimulai di Eropa sejak abad pertengahan, berlanjut hingga akhir tahun 1970, 1980, dan pertengahan 1990an. Konsep pemberdayaan kemudian berdampak pada hipotesis yang dibuat.

Menurut Chamber (1995) (dalam Munawar, 2011) pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembanguwnan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable*. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model

pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata – mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic mental*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Edi Suharto (2014:59) mengenai makna konsep pemberdayaan masyarakat, Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Dimana ia mencirikan pemberdayaan yaitu: “Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mata pencaharian, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Teori pemberdayaan Pendidikan Luar Sekolah di Indonesi pertama kali dikembangkan yaitu oleh Kindervatter dalam Anwar (2016:77) menyebutkan bahwa “Pemberdayaan merupakan proses pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan dan bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, kepekaan warga belajar terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan statusnya dalam masyarakat”.

Menurut Edi Suharto (2010: 59-60) bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara sekaligus tujuan. Suatu cara, pemberdayaan ialah rangkaian aktivitas untuk mendukung daya ataupun keberdayaan kelompok lemah pada masyarakat, tergolong sebagai pribadi yang menghadapi masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan ini mengacu dalam kondisi atau perkembangan perubahan sosial, yakni masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam melengkapi keperluan kehidupnya yang berupa materi, ekonomi, dan sosial seperti percaya diri, ataupun menyampaikan aspirasi, memiliki mata

pencapaian, berkontribusi dalam sebuah kegiatan sosial dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.

Edi Suharto (2014; 63-64) menyimpulkan bahwa terdapat indikator-indikator keberdayaan masyarakat meliputi:

1. Kekuasaan Dalam (power within)

Adanya kesadaran dan keinginan untuk merubah, yaitu meliputi keinginan untuk berperan dalam mengembangkan kearifan lokal tikar mendong, keinginan untuk berpartisipasi dan mengembangkan potensi diri dalam pengembangan kearifan lokal tikar mendong.

2. Kekuasaan Untuk (power to)

Kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses meliputi bertambahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, kemudahan dalam memperoleh kredit dan kemudahan bekerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal dan perusahaan.

3. Kekuasaan Atas (power over)

Kemampuan menghadapi hambatan meliputi terpenuhinya kebutuhan hidup, perubahan dan kepemilikan asset, adanya perubahan peran di dalam keluarga, serta peran dan keterlibatan di dalam masyarakat.

4. Kekuasaan Dengan (power with)

Kemampuan kerjasama dan solidaritas meliputi adanya kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengembangan kearifan lokal tikar mendong, adanya solidaritas terhadap sesama anggota kelompok, mampu mengatasi hambatan dalam pengelolaan kearifan lokal tikar mendong.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan berbasis masyarakat (*community based development*) dan pada tahap selanjutnya yaitu muncul setelah istilah *driven development* yang artinya pembangunan yang diarahkan oleh masyarakat atau *community directed development* atau pembangunan berbasis masyarakat.

B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mardikanto (2014 : 202) Menyatakan bahwa terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Perbaiki kelembagaan (*better institution*).
- 2) Kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- 3) Perbaiki usaha (*better business*). Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan dan perbaiki kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- 4) Perbaiki pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperoleh, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- 5) Perbaiki lingkungan (*better environment*). Perbaiki pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- 6) Perbaiki kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- 7) Perbaiki masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

C. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Terdapat empat prinsip pemberdayaan masyarakat (Najati, S. 2005:54), yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan anatar masyarakat dengan lembaga yang melakukan program – program pemberdayaan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan

mekanisme berbagai pengetahuan, serta keahlian satu sama lain. Masing – masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saing belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala – kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, serta memiliki norma – norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendampingan akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi adalah cara untuk mengerahkan tenaga, dana, daya dan peralatan yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Arti pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu proses yang mengembangkan dan

memperkuat kemampuan masyarakat untuk terus terlibat dalam proses pembangunan yang berlangsung secara dinamis sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi serta dapat mengambil keputusan secara bebas (*independent*) dan mandiri (Sumaryo, 1991).

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat yang dijelaskan oleh (Hikmat & Harry, 2006), yaitu :

- a. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat menegatahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi direct-action. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c. Strategi Transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

E. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Ambar Teguh (Muslim, 2012), menyatakan bahwa tahap – tahap yang harus dilalui tersebut adalah :

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap pertama adalah tahap penyadaran dan pembentukan perilaku merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini pihak pemberdayaan atau aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat yang efektif.

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan. Kecakapan – keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

Tahap kedua atau tahap tranformasi kemampuan yaitu proses mentransformasikan pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Proses tersebut dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum pada taraf objek.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Tahap ketiga atau tahap peningkatan intelektual dan kecakapan – keterampilan merupakan tahap yang diperlukan agar masyarakat dapat membentuk kemampuan masyarakat di dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi – kreasi, dan melakukan inovasi – inovasi di dalam lingkungannya. Apabila masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan, masyarakat pada kondisi ini ditempatkan sebagai subjek pembangunan atau pemeran utama, pemerintah hanya dapat menjadi fasilitator saja.

F. Pola Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Hadiwijoyo (2012 : 34 - 35), menurut Ross (1987 : 77 – 78) mengemukakan 3 pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu :

- a. *The “single function” approach in which programmes or techniques are implanted by external agents.” A new school a medical program or a housing project, which the external agent (or the organization the presents) thinks will benefit the community.*

Artinya, Pendekatan “suatu fungsi” dimana program atau teknik ditanamkan oleh agen eksternal. Sekolah baru, program medis, atau proyek perumahan, yang mana agen eksternal (atau organisasi yang dia berikan) merupakan sesuatu yang akan bermanfaat bagi masyarakat.

Maksudnya, program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Umumnya pola pendekatan ini kurang mendapatkan respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi yang baik sulit di adopsi. Pola ini menjadikan masyarakat tergantung kepada mereka, sehingga prakarsa masyarakat tidak berkembang.

- b. *The “multiple” approach in which there is recognition of the wholeness of community life and a team of experts seeks to provide a variety services and to solve some of the problems which may arise as alterations are made in the community.*

Artinya, pendekatan multi adalah pendekatan dimana ada pengakuan keutuhan kehidupan masyarakat dan tim pembaca berusaha untuk menyediakan berbagai layanan dan untuk memecahkan beberapa masalah yang mungkin timbul sebagai perubahan yang dibuat dimasyarakat.

Pola pendekatan the multiple approach, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.

- c. *The “inner resources approach”. Here stress is laid on the need to encourage communities of people to identify their own wants and needs and to work co – operatively with governmental and other agencies as satisfying them.*

Artinya, “pendekatan sumber daya manusia” disini ditekankan pada perlunya mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan mereka sendiri dan bekerja secara kooperatif dengan badan – badan pemerintahan dan lainnya untuk mensosialisasikan.

G. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka menjadi berdaya. Suzanne Kinder Vetter seperti dikutip Saraswati (Suharto, 2010) mengatakan :

“People gaining an understanding of control over social economic and or political forces in order to improve their standing in society”

Artinya adalah orang – orang yang memperoleh pemahaman dan kendali atas kekuatan ekonomi sosial dan atau politik untuk meningkatkan kedudukan mereka dalam masyarakat.

United National (1956 : 83 – 69) (dalam Hadiwijoyo, 2012:29-30) mengemukakan proses pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. *Getting to know the local community*, mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
- b. *Gathering knowledge about the local community*, mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi factual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan tentang nilai, sikap, ritual, dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.
- c. *Identifying the local leaders*, segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia – sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pemimpin/tokoh – tokoh masyarakat setempat. Untuk itu faktor “the local leader” harus selalu diperhitungkan karena mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
- d. *Stimulating the community to realize that is has problems*, di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasive agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
- e. *Helping people to their problem*, memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
- f. *Helping people to identify their most pressing problems*, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling

menekan, dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

- g. *Fostering self-confidence*, tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
- h. *Deciding on a program action*, masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
- i. *Recognition of strengths and resources*, memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan – kekuatan dan sumber – sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
- j. *Helping people to continue to work solving their problems*, pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, karena itu masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinu.
- k. *Increasing people's ability for self-help*, salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk situ, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.

Dalam (Suharto, 1997) dalam madikanto (2017) hlm. 171 – 172 terdapat strategi pemberdayaan masyarakat, bahwa mengemukakan adanya 5 (lima) P penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin yaitu dengan Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokokan, dan Pemeliharaan :

1. *Pemungkinan*: ialah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural

dan struktural yang menghambat. Pemungkinan ini dapat dilakukan dengan diadakannya kegiatan observasi yang berguna untuk mengetahui potensi masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah itu baru pelaksana merancang program yang sesuai dan memberitahukannya kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Menurut Mardatila (2020) sosialisasi dalam arti sempit adalah proses memperkenalkan suatu program atau kegiatan kepada seseorang dan melihat bagaimana orang tersebut menentukan tindakan dan reaksinya.

2. *Penguatan*: melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembang segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka.
3. *Perlindungan*: merupakan suatu perlindungan untuk masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apabila tidak sehat) diantara yang kuat dan lemah, dan menengah terjadinya perundungan antar kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Menurut Tenner dan Detoro dalam Lawasi (2017) Kerjasama tim adalah sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan kerjasama tim dari pada dilakukan sendiri.
4. *Penyokongan*: atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas

kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Basleman dan Mappa (2011 hlm 34) motivasi yaitu keadaan seseorang yang mendorongnya untuk melakukan tindakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuannya.

5. *Pemeliharaan*: artinya memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

H. Bentuk – Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ndraha (2003), diperlukan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya :

- a. Pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapat apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.
- b. Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai konsumen agar dapat berfungsi sebagai penanggung dari dampak negative pertumbuhan, pembayar resiko, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.
- c. Pemberdayaan sosial – budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan yang adil terhadap manusia.

Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

2.1.2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

A. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebuah usaha dikatakan maju dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satunya adalah kesejahteraan masyarakatnya. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Pentingnya kedudukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional bukan saja karena jumlahnya yang banyak, melainkan juga dalam hal penerapan tenaga kerja. Di samping Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dapat menghasilkan devisa yang cukup besar melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu dan memberikan kontribusi terhadap Product Domestic Bruto (PDB).

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

B. Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Menurut Sarief ciri-ciri UMKM yaitu:

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekaipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
4. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.

C. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam perspektif perkembangan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. (Resalawati, 2016) mengemukakan klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencapai nafkah, yang lebih umum biasa disebut *sector informal*. Contohnya pedagang kaki lima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu melakukan pekerjaan sub kontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

D. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

(Anoraga, 2015) menjelaskan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Sistem cenderung lebih relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak memiliki kaidah administrasi pembukuan standar.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas.

- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negoisasi serta verifikasi pasar yang sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

Menurut Tambunan (2019) karakteristik yang melekat pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelebihan dan kekurangan UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Daya tahan

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan kelangsungan usahanya karena tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha.

- b. Padat Karya

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat padat karya. Dalam proses produksinya usaha kecil lebih memanfaatkan kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin sebagai alat produksi.

- c. Keahlian Khusus

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yang membutuhkan keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal. Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-termurun. Selain itu, produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan teknologi yang sederhana dan murah.

d. Jenis Produk

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansa kultur, yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan dan ukir-ukiran kayu.

e. Keterkaitan dengan Sektor Pertanian.

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat *agricultural based* karena banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil tanpa harus mengakibatkan biaya produksi yang tinggi.

f. Permodalan

Pada Umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang (tabungan) sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan modal kerja.

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia bisnis, keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) yang rendah, manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian tugas yang jelas, serta mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja tidak dibayar.

E. Kekuatan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan yang menjadi basis pengembangan pada masa yang akan datang (Anoraga, 2015):

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan maupun menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen usaha pasar yang unik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian besar memanfaatkan limbah atau hasil sampai dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu untuk mengembangkan sektor lain yang terkait.

Menurut (Tambunan, 2019) kelemahan yang sering juga menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 2 faktor:

1) Faktor Internal

Faktor internal, merupakan masalah klasik dari UMKM yaitu diantaranya:

- a. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM).
- b. Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khusus sebagian dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
- c. Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil.
- d. Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah relatif kecil.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembangan dan pembinaan UMKM. Misalnya solusi yang diberikan tidak

tepat sasaran tidak adanya monitoring dan program yang tumpang tindih. Dari kedua faktor tersebut muncullah kesenjangan diantara faktor internal dan eksternal, yaitu disisi perbankan, BUMN dan lembaga pendamping lainnya sudah siap dengan pemberian kredit, tapi UMKM mana yang diberi, karena berbagai ketentuan yang harus dipenhi oleh UMKM. Disisi lain UMKM juga mengalamo kesulitan mencari dan menentukan lembaga mana yang dapat membantu dengan keterbatasan yang mereka miliki dan kondisi ini ternyata masih berlangsung meskipun berbagai usaha telah diupayakan untuk memudahkan bagi para pelaku UMKM memperoleh kredit, dan ini telah berlangsung 20 tahun.

Pola yang ada sekarang adalah masing-masing lembaga/institusi yang memiliki fungsi yang sama tidak berkoordinasi tapi berjalan sendiri-sendiri, apakah itu perbankan, BUMN, departemen, LSM, perusahaan swasta. Disisi lain dengan keterbatasannya UMKM menjadi penopang perekonomian menjadi roda perekonomian menjadi kenyataan.

2.1.3. Kesejahteraan Masyarakat

A. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat terdiri dari dua kata, yaitu: kesejahteraan yang berarti hal atau keadaan sejahtera yang meliputi rasa aman, sentosa, makmur, dan selamat dan masyarakat yang berarti sejumlah orang dalam kelompok tertentu yang membentuk perikehidupan berbudaya. Konsep kesejahteraan menurut (Nasikun, 1993) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martbat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: rasa aman (*security*), kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan jati diri (*identity*). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhan (Rosni, 2017:57).

Menurut Fahrudin, kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan,

pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Rosni, 2017:57)

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang diatas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papam dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup (Undang-Undang No. 11 Tahun 2009).

Secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan pengertian dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi dari kesejahteraan masyarakat yaitu sebuah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial masyarakat untuk menunjang kualitas hidupnya atau sehingga terlepas dari rantai kemiskinan, kebodohan, atau kekhawatiran baik secara lahir maupun batin yang dapat menciptakan suasana aman, tentram dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan pada umumnya dapat diukur dengan melihat beberapa aspek kehidupan, yaitu:

- a) Kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b) Kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

- c) Kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
- d) Kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya. (Rosni, 2017:58).

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kesejahteraan sosial dapat diukur dari delapan indikator sebagai berikut:

- 1) Kependudukan, meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk.
- 2) Kesehatan, meliputi derajat kesehatan masyarakat (angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan angka kesakitan), ketersediaan fasilitas kesehatan, serta status kesehatan ibu dan balita.
- 3) Pendidikan, meliputi kemampuan membaca dan menulis, tingkat partisipasi sekolah serta fasilitas pendidikan.
- 4) Ketenagakerjaan, meliputi kesempatan kerja, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan, jam kerja serta pekerjaan anak dibawah umur.
- 5) Taraf dan pola konsumsi, meliputi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.
- 6) Perumahan dan lingkungan, meliputi kualitas rumah tinggal, fasilitas rumah dan kebersihan lingkungan.
- 7) Kemiskinan yakni berdasarkan tingkat tinggi rendahnya kemiskinan.
- 8) Sosial lainnya meliputi perjalanan wisata, penambahan kredit usaha untuk melihat minat masyarakat, hiburan dan kegiatan sosial budaya, tindak kesehatan serta akses teknologi informasi dan komunikasi (BPS, 2016:160).

C. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat mempunyai tujuan, yaitu:

- a) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam artotercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber,

meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Selain itu, *schneiderman* (1972) mengemukakan tiga tujuan tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu:

1) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan masyarakat dalam masyarakat, termaksud hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok maupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti penggunaan sistem rujukan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

2) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

3) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyingkirkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan

struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula (Fahrudin, 2012:10).

D. Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain:

a) Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan masyarakat ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b) Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi maupun fisik, emosional dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

c) Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung maupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d) Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain (Fahrudin, 2012:12).

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian ini, maka diperlukan hasil penelitian yang relevan, ini berguna untuk merensi beberapa sumber buku yang berisi teori

dan konsep yang dikemukakan oleh para pakar dan ahli. Hasil penelitian yang relevan penulis mendapatkan sumber diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Jurnal Hanna Fitriyati, dengan judul “Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia” dalam penelitiannya menerangkan bahwa UMKM memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih baik dibanding dengan ekonomi konglomerat karena mampu bertahan dan mendongkrak perekonomian nasional dari kebangkrutan. Dalam penelitian ini mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM khususnya keterbatasan modal, kesulitan pemasaran, kesulitan terhadap bahan baku. Skill Sumberdaya Daya Manusia (SDM), teknologi yang digunakan kemampuan manajerial yang rendah. Penelitian ini mengemukakan beberapa strategi pemberdayaan UMKM diantaranya strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif, strategi peningkatan asset kepada sumber daya produktif, strategi pengembangan produk dan pemasaran, strategi peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Jurnal Senen Machmud dan Iwan Sidharta (2013), dengan judul “Model Kajian Pendekatan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Sektor UMKM di Kota Bandung” dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung dapat dilakukan dengan pendekatan strategi dengan mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kemudian melakukan analisis terhadap keunggulan UMKM dan kesuksesan UMKM, kemudian dilakukan analisis SWOT kelemahan, yang pada akhirnya dilakukannya suatu rumusan konsep pengembangan UMKM dan tujuan serta sasaran yang ingin divapai sehingga memperoleh strategi pengembangan UMKM dengan mengeluarkan suatu kebijakan mengenai perkembangan UMKM, program pengembangan dan kegiatan UMKM.

- c. Ayuni Lathifah, 2019. Judul skripsi “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Asosiasi Mekarsari Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang” Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pemberdayaan adalah suatu proses belajar untuk mencapai kemandirian. Melalui proses belajar maka masyarakat akan memperoleh kemampuan dan mencapai kemandirian secara bertahap sebagai bekal agar menjadi masyarakat yang kreatif, produktif, inovatif dan memiliki keterampilan agar mereka lebih mandiri, meningkatkannya kesejahteraan dan penghasilan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan melalui UMKM dan untuk mendeskripsikan faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berjalan secara bertahap yaitu persiapan, pengkajian, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat ini adalah adanya dukungan pemerintah berupa program-program pelatihan berserta narasumber dan tingginya motivasi masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai teknik pemasaran online serta pemasarannya belum berkembang secara baik.
- d. M. Aldy Febriansyah Afe, UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, hasil permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara kita adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Sering dengan perkembangannya zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan di Indonesia. penelitian ini termasuk penelitian kualitatif

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa wawancara observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 552 dan sampel yang digunakan penulis sebanyak 10%, yaitu sebanyak 52 orang hasil menyatakan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat banyak masyarakat merasa terbantu dalam kegiatan perekonomiannya serta memiliki kemajuan dalam omset pendapatan sehari-hari dari usaha yang mereka jalani, hal ini juga dapat membuktikan bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat cukup baik untuk dikembangkan lagi, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam peningkatan UMKM ini diantaranya masih kurang optimalnya sosialisai yang dilakukan.

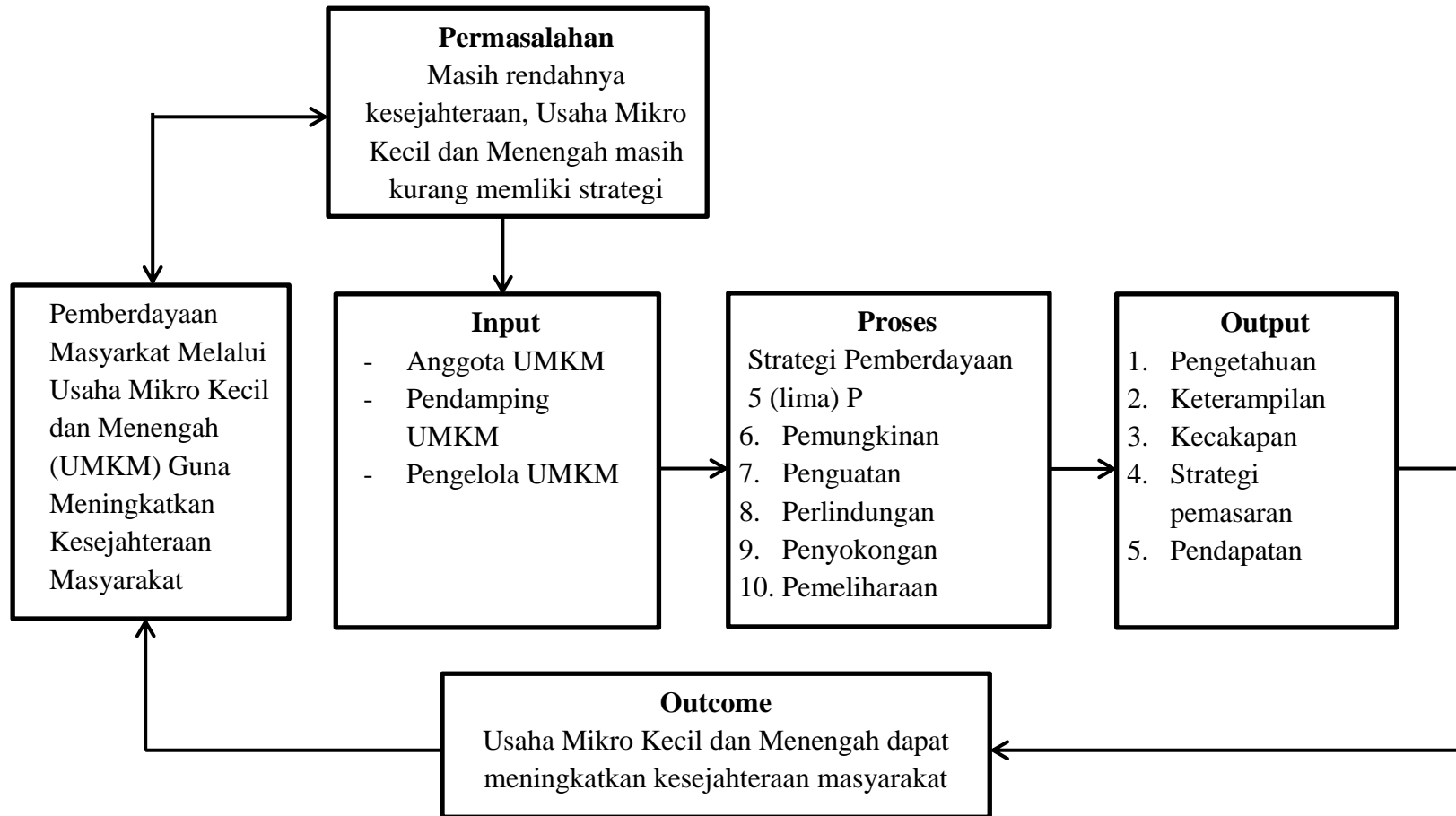
- e. Dian Widiastri, dengan Judul “Pengembangan Usaha Home Industry Rumah Lidi Desa Karang Tengah Cilongok Banyumas” hasil penelitian pengembangan UMKM menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengigit kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Peranan UMKM yang sangat besar tersebut, memberikan penjabaran bahwa UMKM harus dapat ditingkatkan leboh baik lagi. Sudah seharusnya juga UMKM untuk memperhatikan strategi usaha guna mempertahankan dan mengembangkan usaha yang sudah ada agar tetap dapat bersaing.

2.3. Kerangka Konseptual

Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini berhasil berkembang dengan sangat pesat dimasyarakat, perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pesat juga secara otomatis memunculkan kebutuhan pangan yang meningkat pula. Dengan berdirinya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di suatu daerah pastinya dapat memberikan banyak manfaat, seperti perkembangan potensi masyarakat di suatu daerah pastinya memberikan manfaat seperti pengembangan dari segi keterampilan, budaya yang telah turun temurun dan

makanan khas daerah tersebut dapat dengan mudah untuk di ekspolarasi kembali sehingga bisa menajdi lahan mata pencaharian tambahan bagi masyarakat sekitar.

Semua hal bisa terjadi dikarenakan produk yang dikelola oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) biasanya adalah suatu makanan khas yang ada di daerah tersebut, dengan seperti itu banyaj produk yang dapat dijual maka semakin tinggi pula kebutuhan bahan baku sereta semakin banyak pula dibutuhkan tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat membantu memproduksi hasil produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Jadi, dengan keberadaan UMKM juga bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga dengan keberadaan UMKM bisa memberikan pendapatan tambahan dan pastinya secara tidak langsung dengan keberadaan UMKM juga diharapkan bisa membantu kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.



Tabel 1. Kerangka Koseptual

2.4. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan ini berkaitan dengan penegasan masalah sebagai turunan dari rumusan masalah, pertanyaan penelitian dengan bentuk kalimat tanya yang secara menyeluruh dari permasalahan yang ada sebagai berikut : Bagaimana proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?